BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana akan di proses secara hukum dan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap orang yang terlibat melakukan perbuatan main hakim sendiri akan ditangkap dan di proses hukum jika benar-benar terbukti bermasalah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri yaitu pada tingkat penyidikan, pelaku main hakim sendiri yang benar-benar terbukti bersalah akan di proses secara hukum dengan dijerat Pasal 170 KUHP, walaupun perbuatan dan peran masing-masing pelaku berbeda-beda, ada yang hanya memukul dengan tangan kosong, ada yang memukul menggunakan benda tumpul, ada yang memprofokasi dan lain-lain, tetap dijerat pasal 170 KUHP. Namun pada tingkat pengadilan vonis atau sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada masing-masing pelaku main hakim sendiri tersebut berbeda-beda, sesuai dengan pertimbangan dan putusan hakim ditentukan berdasarkan kesalahan dan peran dari masing-masing pelaku.
2. Dalam menangani tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian menemui beberapa kendala, diantaranya: masyarakat jarang memberi laporan mengenai adanya tindakan Main Hakim Sendiri, masyarakat yang ada di lokasi tidak mau menjadi saksi

(memberikan keterangan) mengenai terjadinya tindakan main hakim sendiri sehingga penyidik susah untuk menentukan siapa saja pelaku yang ingin dijadikan tersangka, kurangnya alat bukti karena pelaku main hakim sendiri dilakukan oleh orang banyak atau massa dan saling tidak kenal satu sama lain.

Saran

1. Dalam menangani tindakan main hakim sendiri pihak kepolisian harus meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi hukum untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri adalah suatu kejahatan dan perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan main hakim sendiri tidak terjadi lagi.
2. Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas. Kepolisian harus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja sehingga masyarakat akan puas atas kinerja kepolisian dan tumbuh rasa percaya serta hubungan baik antara polisi dan masyarakat.